

Perspektif Islam

Membangun Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan Inklusif

Zusiana Elly Triantini

Dosen Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Abstract: As universal system of values, Islam does not tend to support any discrimination based on any kinds of social differences, i.e. culture, religion, and gender. Islam actually acknowledges human differences. However, they are not seen as social basis for discrimination but as a way to construct just culture and structure within pluralistic people so all people live together harmoniously. In the case of gender equity in ruling education, female has opportunity and great potens to success in ruling education since the education built within inclusive gender paradigma. This paper tries to promote alternative way in understand texts within sociohistorical contexts concerning the female chance to be principle for education. As well, it also promote alternative way in stucturing theory of inclusive education within female leadership.

Keywords: *Islam, Gender Equity, Inclusive, Education, and Female leadership.*

Pendahuluan

Diawali dengan melihat realitas kepemimpinan perempuan dalam Islam secara teologis dan sosiologis, yang kemudian dipadu dengan urgensi pendidikan inklusif, penulis mencoba menawarkan wacana baru perihal kepemimpinan perempuan dalam pendidikan inklusif dari perspektif Islam. Analisa pemikiran dalam tulisan ini dilandasi dari pandangan yang kontroversial dan multitafsir. Pandangan ini seringkali diabaikan oleh para peminat wacana keislaman, terutama peminat wacana keislaman yang tekstualis.

Padahal, apabila ditelisik lebih jauh, Islam sebagai norma yang inklusif tidak bersifat diskriminasi terhadap siapapun, baik berdasarkan gender, etnis, agama maupun bentuk fisik (antara difabel dan non-difabel). Inilah spirit dasar pendidikan inklusif yang perlu dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia karena pendidikan inklusif mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kasih sayang,

egalitarianisme, pluralisme, gender *mainstreaming*, dan keadilan seperti halnya ajaran Islam.

Untuk mencapai tujuan dasar pendidikan inklusif tersebut, dibutuhkan prasyarat-prasyarat yang memadai seperti kurikulum, metode pembelajaran dan civitas akademika yang saling mendukung dan memotivasi. Selain itu, kepemimpinan yang transformatif, visioner dan non-diskriminatif mutlak diperlukan, apalagi bila dalam lembaga pendidikan (formal dan informal) tersebut menyediakan ruang belajar bagi kaum difabel dan peserta didik yang multikultural.

Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam periode sejarah pra-Islam, tepatnya masa *Jabilyah*, tidak banyak perempuan yang tampil dalam wilayah publik dan kebudayaan. Mereka terkekang dalam tembok-tembok rumah. Kebudayaan patriarki (serba laki-laki) ketika itu telah menenggelamkan perempuan dalam timbunan sejarah. Dalam kondisi krisis eksistensial bagi perempuan seperti inilah, Islam hadir untuk menjunjung tinggi semua peradaban dan semua kebudayaan manusia (*rahmatan lil alamin*), termasuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Hadirnya Islam merupakan bukti autentik revolusi yang selama berabad-abad telah berperan sangat signifikan dalam panggung sejarah umat manusia. Sejarah Nabi Muhammad SAW adalah bukti empirik-historis Islam tegak di tengah-tengah terpuruknya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Islam bukan hanya datang sebagai juru penyelamat, tetapi keberadaannya juga menawarkan nilai-nilai humanis yang berorientasi kepada pembebasan dan memihak kepada yang lemah. Perjuangan menegakkan nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan dan kesetaraan dilakukan oleh Nabi beserta sahabat dengan taktik dan strategi politik yang genius sehingga secara revolutif kondisi masyarakat *jabili* dapat ditransformasi menjadi masyarakat beradab dan religius.¹

Islam telah mengganti pranata sosial masyarakat ketika itu. Realitas sistem sosial politik masyarakat Arab yang eksklusif dan anti-perubahan yang telah terbukti menjadi alat legitimasi Quraisy bertindak sewenang-wenang secara sosial-politik, dirombak oleh sistem Islam yang mengutamakan persamaan,

anti-penindasan, kemaslahatan dan keadilan. Islam ingin mengatakan *say no to racism*, lewat manifesto doktrin equalitas (*al-musawab*) manusia sejagad.²

Islam memerintahkan pentingnya berbuat adil, apapun status dan posisinya. Apalagi jika seseorang berperan sebagai pemimpin, keadilan akan menjadi pilar dari tegaknya komunitas. Siapa pun pemimpinnya, tidak peduli agama, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan siapa keturunannya, asalkan ia mampu bertindak adil dan menjauhi kezaliman, maka komunitasnya akan berjaya dan makmur. Namun, siapapun yang memimpin dengan cara despotis, maka yang terjadi adalah kebangkrutan negara dan kesengsaraan rakyatnya.

Dalam kaitan itu, Islam menganjurkan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat, dan menegakkan hukum dengan benar dan adil. Adapun untuk menciptakan suasana yang kondusif dan berlandaskan pada keadilan, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu bertindak adil dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah Allah Swt yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Term inilah yang seharusnya selalu dipegang oleh para pemimpin, tidak seperti yang terjadi dalam realitas kehidupan sekarang ini. Inilah yang membuat tidak sedikit orang berlomba-lomba meraih jabatan untuk menjadi pemimpin. Mereka lupa bahwa seorang pemimpin mengemban tanggung jawab berat, termasuk menjadi rujukan semua orang termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa, yang kelak harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat.

Konsep lain yang juga patut dijadikan dasar adalah tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Alih-alih melakukan diskriminasi, Islam turun menjadi rahmat dan membebaskan kaum perempuan dari hegemoni laki-laki di era *jabiliyyah*. Bahkan, Islam menganjurkan kaum perempuan mengaktualisasikan dirinya dalam ranah publik sebagaimana peran Siti Khodijah yang membantu dakwah Nabi dan Siti Aisyah yang setia mendampingi Nabi dalam menjalankan fungsinya. Perempuan mempunyai hak yang sama dalam semua aspek kehidupan seperti hak berpolitik, ekonomi maupun pendidikan.

Keterlibatan perempuan di ranah publik (terlebih sebagai pemimpin) merupakan cerminan implementasi dari demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Pemberian kesempatan untuk terlibat dalam urusan publik akan memberi manfaat besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Kegagalan dan kesuksesan memimpin komunitas tidak ada kaitan dengan persoalan jenis kelamin, tetapi lebih pada sistem yang diterapkan dan kemampuan memimpin. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah—sebagaimana dikutip Hussein Muhammad bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik, yang paling penting adalah kemaslahatan.³

Terkait dengan pemikiran beberapa ulama yang mengajukan syarat laki-laki bagi seorang pemimpin, maka dalam konteks kekinian dan juga melihat realitas sosial yang ada. Penulis menyimpulkan bahwa pemikiran ulama tersebut sudah tidak relevan dengan konteks zaman dan harus ditinjau ulang agar hukum Islam tetap eksis dan kontekstual dalam segala ruang dan waktu. Selain itu, jika dipahami lebih teliti, hadits Nabi yang sering dijadikan rujukan para ulama tersebut tidak secara tegas melarang seorang perempuan menjadi pemimpin. Jika asumsinya karena perempuan tidak memiliki kemampuan rasio yang memadai jika dihadapkan dengan laki-laki, seperti argumentasi yang biasa digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan, maka alasan yang demikian berlaku hanya pada masa-masa dulu.⁴

Dengan situasi zaman yang seperti sekarang ini, di mana terbukanya seluruh aspek yang dulu tidak bisa diakses perempuan, maka pemahaman di atas menjadi terpatahkan secara otomatis. Selain itu, asumsi perempuan secara fisik lemah sehingga tidak pantas menjadi pemimpin, juga menjadi tidak signifikan lagi ketika saat ini modal transportasi, komunikasi dan teknologi telah menjembatani keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Urgensi Pendidikan Pluralis dan Inklusif

Salah satu aspek penting untuk mengembangkan sikap yang inklusif dan pluralis adalah pendidikan. Namun demikian, aspek pendidikan selama ini kurang tersentuh karena hanya dipandang sebagai persoalan pinggiran yang tidak signifikan. Padahal, pendidikan dalam arti umum adalah dasar untuk menciptakan karakter suatu bangsa. Pendidikan adalah wahana paling efektif untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan inklusifisme.

Pendidikan inklusif kini di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak diwujudkan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik horizontal yang akhir-

akhir ini banyak terjadi. Pendidikan ini menjadi amat penting jika memang berkeinginan mempertahankan dan memelihara keberlangsungan persatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumih nilai toleransi, empati, tolong menolong, simpati, solidaritas nasional dan sikap-sikap kemanusiaan yang mulia lainnya, bukannya eksklusif, fanatik, dan tertutup.⁵

Terdapat beragam pendapat tentang pengertian pendidikan inklusif dan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Secara prinsip, hal itu dapat disepakati bahwa inklusifitas dalam pendidikan dapat dilihat sebagai proses untuk menyediakan sistem pendidikan yang menitikberatkan pada humanitas (*humanity*). Prinsip dasar humanitas adalah memperlakukan manusia sebagai *human being*, serta tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan etnisitas, gender, status sosial, kemampuan (difabel atau non-difabel), maupun agama.⁶

Dalam Islam upaya untuk mengajarkan yang diwarnai dengan nilai-nilai inklusifitas bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis dan tradisi dalam sejarah peradaban Islam. Semua umat manusia berhak memperoleh pendidikan yang sama seperti kaum difabel maupun perempuan.

Terhadap hak-hak difabel, Islam mengajarkan agar memperhatikan umat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sejarah Islam yang menceritakan tentang seorang sahabat tunanetra bernama Abdullah Bin Ummi Maktum. Suatu hari, Abdullah menemui Nabi untuk belajar agama Islam. Namun, kala itu, Nabi tengah menjamu sejumlah tamu dari kalangan pembesar suku Quraisy, dengan harapan agar pemuka-pemuka Quraisy itu masuk Islam, maka Nabi pun lantas bermuka masam terhadap sahabat yang tunanetra tadi. Melihat sikap Nabi seperti itu, Allah segera menegur beliau untuk memperhatikan hak tunanetra untuk belajar agama Islam. Cerita ini menggambarkan bahwa Allah memperhatikan hak-hak kaum difabel.⁷ Selain masalah difabel, isu lain yang mendapat perhatian serius dalam pendidikan inklusif adalah hak-hak perempuan. Kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-haknya seperti di bidang sosial, politik, budaya maupun pendidikan.

Dasar teologisnya adalah firman Allah dalam al-Qur'an:

"Dan barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan selagi ia beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik

(berkualitas) dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”⁸

Begitu juga Allah akan mengangkat derajat laki-laki dan perempuan yang beriman dan berilmu ke dalam derajat yang tinggi.⁹ Dalam hadits dijelaskan, *“menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim laki dan perempuan”* (HR. Bukhari).

Menurut M. Athiyah al-Abrosyi, pendidikan bagi perempuan bertumpu pada empat dasar pokok, yaitu kesetaraan, kebebasan, demokrasi dan keadilan. Pada dasarnya, manusia memiliki derajat yang setara di hadapan Allah. Oleh karenanya manusia harus diberi kebebasan dan peran yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Dasar tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari demokrasi pendidikan yang menjadi spirit dari pendidikan inklusif.¹⁰

Dalam pendidikan inklusif, semua suprastruktur dan infrastrukturnya harus mencerminkan semangat keterbukaan dan menghindari eksklusifitas. Kurikulum yang diajarkan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang riil di masyarakat dan bersifat *bottom-up*. Nilai-nilai kemanusiaan universal harus menjadi substansi pengajarannya. Masalah HAM, toleransi, pluralitas, isu gender, sensitivitas terhadap ekologi serta isu-isu kontemporer adalah muatan inti yang harus selalu ada dalam kurikulum. Dalam hal ini, salah satu prinsip dan karakter kurikulum pendidikan Islam adalah prinsip universal, yang meliputi semua aspek dan non-diskriminatif.¹¹

Kerangka nalar yang dikembangkan model pendidikan ini adalah pembebasan dan kemerdekaan dengan mengabaikan kerangka nalar konvensional yaitu pendidikan sebagai praktik penjinakan manusia. Prinsip dasar paradigma pendidikan yang membebaskan adalah proses belajar dilakukan dengan meyakini setiap manusia memiliki pengalaman hidup yang bisa menjadi kekuatan pengubah jika digunakan sebagai basis pembelajaran. Pembelajaran yang mendasarkan diri pada pengalaman manusia berorientasi pada proses pendidikan yang dikembangkan “bersama dengan”, sehingga peserta didik sedang mengalami proses menjadi dirinya sendiri.¹²

Untuk mencapai cita-cita tersebut, dalam pendidikan inklusif menganut prinsip dialogis dengan mengabaikan adanya dominasi ilmu pengetahuan dan pengalaman pada satu individu tertentu. Setiap orang yang terlibat dalam proses

belajar, berkedudukan sejajar, sebagai teman belajar, teman dialog, dengan terbuka saling berbagi pengalaman dan proses hidup sehari-hari.

Karakter Pemimpin Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Dunia dan kehidupan dicipta penuh dengan pluralitas, corak, warna, variasi, dan perbedaan. Jika mau hidup di dunia, maka harus mengembangkan rasa tenggang rasa, inklusif, toleransi, membiasakan diri melihat yang berlainan, merasa kaya dan bahagia dengan perbedaan. Masyarakat harus diberi kesadaran bahwa dunia ini multikultural, multireligius, multirasial, dengan diversitas natural dan kultural yang sangat tinggi. Mereka memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam realitas kehidupannya. Dalam lingkungan seperti ini dibutuhkan seorang pemimpin yang transformatif dan demokratis yang membawa perubahan. Apalagi dalam dunia pendidikan inklusif dibutuhkan pemimpin yang demokratis, elegan dan memiliki sikap keterbukaan secara teoretis maupun praksis apapun status sosialnya.¹³

Kepemimpinan transformasional dalam praktiknya menjalankan kepemimpinan selangkah lebih jauh dari pola yang lain, yaitu berusaha untuk meningkatkan (mentransformasikan) tujuan pribadi (atau yang hanya terfokus pada tujuan pribadi) kepada tujuan yang lebih tinggi, lebih jauh ke depan yang bersifat nasional, bahkan global.

Kepemimpinan transformasional mengkomunikasikan visi yang memberi inspirasi dan mendorong (memotivasi) para pengikut untuk mencapai hal-hal yang bersifat lebih luas, tinggi, dan bahkan luar biasa. Para pemimpin dalam kepemimpinan ini memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengatur anggota dan sistemnya sedemikian rupa sehingga semua anggota memiliki integritas tinggi terhadap visi dan misi organisasi. Ciri khas dari kepemimpinan ini bahwa pemimpin sangat memperhatikan kepedulian dan pengembangan para anggotanya. Dia mengubah anggota-anggotanya dengan membantu mereka untuk melihat hal-hal yang lama dengan cara pandang yang baru. Pemimpin mampu membuat anggota terpesona, bersemangat, dan terinspirasi sehingga mereka semakin termotivasi untuk mencapai sasaran (visi) yang telah ditetapkan bersama. Selain itu, pemimpin mampu membuat visi organisasi

jelas dan dimengerti sehingga menjadi milik setiap anggota, sehingga setiap anggota menganggap visi organisasi adalah visinya sendiri, inilah kekuatan dari kepemimpinan transformasional.

Dalam dunia pendidikan inklusif, seorang pemimpin perempuan transformatif dan demokratis harus mempunyai modal intelektual dan sosial yang tinggi, seperti semangat egaliterianisme (*al-musawab*), pluralisme, menjunjung tinggi nilai keadilan dan toleransi. Apalagi lembaga tersebut mengelola studi layanan difabel atau pendidikan bagi non-muslim. Kepekaan sosial, non-diskriminasi serta toleransi mutlak diperlukan oleh seorang pemimpin perempuan.

Terhadap peserta didik yang difabel, mereka harus mendapatkan komponen-komponen pembelajaran yang sama dengan yang non-difabel. Bagi pelajar dan mahasiswa difabel, kurangnya aksesibilitas dalam sistem pengajaran yang mereka alami akan berpengaruh terhadap tingkat eksklusi sosialnya. Mereka harus mendapatkan dukungan sosial yang maksimal dari lingkungan akademik, administrasi maupun pimpinannya agar mereka dapat secara maksimal beraktivitas dan merasa setara dengan yang non-difabel, bukan merasa menjadi manusia kelas dua (*the second class communities*).

Begitu juga bagi pelajar dan mahasiswa non-muslim, keterbukaan untuk menerima mereka, pelayanan yang profesional, dan pergaulan yang akrab antara teman muslim dan non-muslim serta seluruh civitas akademika, pada gilirannya akan meruntuhkan anggapan bahwa Islam adalah agama yang keras dan suka dengan kekerasan.¹⁴ Wawasan pluralis-multikultural dan inklusif dalam pendidikan merupakan modal penting agar kalangan terpelajar dan masyarakat luas menghargai perbedaan (termasuk gender) secara tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling curiga. Padahal, pangkal mengentalnya prasangka (*prejudices*) sebagai faktor konflik dan integrasi adalah karena pendidikan selama ini bersifat eksklusif dan sarat indoktrinasi.

Dalam perspektif Islam, konsep-konsep modal sosial inilah yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam membangun komunitasnya. Selain modal *trust* (saling percaya) seperti keadilan dan kejujuran di atas, seorang pemimpin harus menyempurnakannya dengan modal yang lain berupa jaringan sosial dan tata nilai. Jaringan sosial berupa partisipasi, resiprositas, solidaritas dan kerja-

sama. Sementara itu, tata nilai berupa pranata-pranata yang dimiliki bersama, norma dan saksi serta aturan-aturan humanis yang berasal dari kesepakatan bersama.

Senafas dengan konsep di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis dalam buku *Human Behavior at Work*, ada 4 sifat yang dapat menyebabkan keberhasilan kepemimpinan, keempat sifat tersebut adalah:

- a. *Intellegence* (intelegensia). Para pemimpin rata-rata lebih cerdas ataupun lebih berpengalaman dari bawahannya;
- b. *Social maturity and breadth* (kematangan dan keluasan pandangan sosial);
- c. *Inner motivation and achievement drives* (mempunyai keinginan dan motivasi dari dalam untuk berprestasi); dan
- d. *Human relations attitudes* (mempunyai kemampuan mengadakan hubungan antarmanusia).¹⁵

Mengenai kepemimpinan secara umum, termasuk perempuan dalam lembaga apapun, sebenarnya antara Islam, Barat maupun Jawa secara substansinya adalah beriringan. Dalam tradisi luhur budaya Jawa misalnya, sudah sejak lama mengajarkan falsafah hidup dalam kepemimpinan. Falsafah tersebut adalah seorang pemimpin itu harus bisa:

1. *Ngayomi* (melindungi). Seorang pemimpin itu harus mampu melindungi dan memahami bawahannya dengan kata lain seorang pemimpin itu harus mempunyai *sense of belongings*;
2. *Ngayabi* (memberikan petunjuk). Profesionalisme seorang pemimpin disini dituntut untuk mampu memberikan petunjuk yang jelas dan tahu yang harus diperbuat oleh bawahannya dalam setiap tugasnya;
3. *Ngajeni* (merawat). Selain dengan profesionalismenya, seorang pemimpin harus mampu memberikan kebijakan ia harus pula memperhatikan kondisi sosial dan kesejahteraan anak buah yang dipimpin; dan
4. *Ngomahi* (membagi). Bila organisasi mendapatkan hasil berupa materi yang didapatkan karena usaha dan kerja sama dari organisasi, maka seorang pemimpin harus dapat membagi secara adil dan merata sesuai tanggung jawab yang diemban oleh setiap bawahannya.

Terlepas dari semua itu, kepemimpinan perempuan dalam dunia pendidikan mustahil dapat tercapai tanpa merealisasikan tiga tahapan penting yang saling

berkaitan, yaitu: *Pertama*, pengakuan terhadap kemampuan dan kompetensi politik kaum perempuan; *Kedua*, penghargaan atau pengakuan tersebut mencapai momentumnya ketika kaum perempuan menjadi sadar secara politik dan menyadari tanggung jawabnya dalam masyarakat; dan *Ketiga*, memunculkan partisipasi politik yang luas di kalangan kaum perempuan yang dikondisikan oleh kemampuan-kemampuan dan tingkat kesadaran diri mereka sendiri yang dipraktikkan pada sebuah latar belakang sosial yang menyenangkan serta memberikan rangsangan dan momentum bagi mereka.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam kepemimpinan perempuan dalam pendidikan inklusif adalah karakter dan kecenderungan perempuan yang lebih terbuka terhadap perbedaan (sifat kasih sayang) yang seharusnya dimanfaatkan dalam pengembangan pendidikan inklusif. Ciri khas pendidikan Islam adalah inklusif yang memelihara kemaslahatan universal yang mengabadikan eksistensi nilai-nilai ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶

Jika realitas seperti di atas dapat diterima secara luas oleh kalangan akademisi, maka implikasi terhadap dunia pendidikan kontemporer akan sangat luas sehingga para akademisi tidak akan tergelincir pada kubangan logosentrisme dan eksklusifisme. Hal itu akan berdampak pada adanya kesadaran bahwa selama ini sebagian umat terjebak dalam dunia misoginis yang meremehkan kemampuan kepemimpinan perempuan.

Penutup

Dengan kelebihan perempuan dan didorong oleh siklus zaman yang sudah terbuka terhadap perempuan, sudah selayaknya kepemimpinan perempuan dijadikan salah satu alternatif dalam pendidikan inklusif guna mengembangkan pendidikan yang humanis, pluralis dan egaliter. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tidak perlu berharap bahwa hasil pendidikan inklusif-pluralis dapat dirasakan tahun ini atau dua tiga tahun ke depan. Namun begitu, sedikit apapun yang dapat diperbuat dunia pendidikan menuju masyarakat egaliter dan inklusif harus tetap dilakukan mulai saat ini.

Endnotes

- ¹ Humaidy Abdussami dan Masnun Tahir, *Islam dan Hubungan Antar Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hal. 143.
- ² QS. al-Hujurat : 13.
- ³ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 151.
- ⁴ Abdul Jalil, dkk., *Fiqh Rakyat;Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta; LKiS; 2000), hal. 75.
- ⁵ Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), hal.13.
- ⁶ Fatimah, "Menuju Pendidikan Inklusif", makalah pidato seminar Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga ke 56, 23 Oktober 2007, hal. 14.
- ⁷ Najib Kailani dan Ahmad Sidqi (Ed.), *Kumpulan Khutbah Pilihan Membumikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hal. 121.
- ⁸ Q.S. an-Nahl : 97.
- ⁹ QS. al-Mujadalah : 11.
- ¹⁰ M. Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Bustomi A. Gani dan Djohar Bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 173. Lihat juga Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hal. 136.
- ¹¹ *Ibid.*, hal. 134.
- ¹² Mustaghfirah Rahayu dan Mukhotib M.D., *Islam dan Gerakan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- ¹³ Bandingkan dengan Mahmud Arif, *Involusi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: IDEA Press, 2006), hal. 106.
- ¹⁴ Fatimah, "Menuju....", hal. 12.
- ¹⁵ Gary Yukul, *Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhallindo, 1998), hal. 54.
- ¹⁶ Sumedi, *Kritisisme Hikmah ke Arah Epistemologi Pendidikan Islam Humanis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2008), hal. 246.

Daftar Pustaka

- Abdussami, Humaidy dan Masnun Tahir. 2007. *Islam dan Hubungan Antar Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Abrasy, M. Athiyah. 1993. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terj. Bustomi A. Gani dan Djohar Bahri. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arif, Mahmud. 2006. *Involusi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2004. *Islam Mazhab Kritis*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Fatimah, 2007. "Menuju Pendidikan Inklusif", makalah pidato seminar Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga ke 56, 23 Oktober 2007
- Jalil, Abdul, et al. 2000. *Fiqh Rakyat;Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kailani, Najib dan Ahmad Sidqi (Ed.). 2006. *Kumpulan Khutbah Pilihan Membumikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Hussein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahayu, Mustaghfirah dan Mukhotib M.D. 2007. *Islam dan Gerakan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Suharto, Toto. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Sumedi. 2008. *Kritisme Hikmah ke Arah Epistemologi Pendidikan Islam Humanis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Yukul, Gary. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo.